



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

REALISASI APBN
TAHUN ANGGARAN 2016
Tanggal : 1 Januari s.d. 29 April 2016

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBN*	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.822,5	386,5	21,2
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.820,5	386,3	21,2
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.546,7	320,6	20,7
a. Pajak Dalam Negeri	1.506,6	309,1	20,5
i. Pajak Penghasilan	757,2	186,0	24,6
- Migas	42,1	12,0	28,6
- Non - Migas	715,1	173,9	24,3
ii. Pajak Pertambahan Nilai	571,7	101,4	17,7
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	19,4	0,5	2,6
iv. BPHTB	0,0	0,0	0,0
v. Cukai	146,4	19,2	13,1
vi. Pajak lainnya	11,8	2,0	16,9
b. Pajak Perdagangan Internasional	40,1	11,4	28,4
i. Bea Masuk	37,2	10,7	28,7
ii. Bea Keluar	2,9	0,7	24,9
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	273,8	65,8	24,0
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	124,9	17,2	13,8
i. Migas	78,6	11,2	14,3
ii. Non Migas	46,3	6,0	13,0
b. Bagian Laba BUMN	34,2	10,0	29,3
c. PNBPN Lainnya	79,4	29,0	36,5
d. Pendapatan BLU	35,4	9,5	27,0
II. HIBAH	2,0	0,2	11,0
B. BELANJA NEGARA	2.095,7	544,8	26,0
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.325,6	276,2	20,8
1. Belanja Pegawai	347,5	97,3	28,0
2. Belanja Barang	325,4	42,4	13,0
3. Belanja Modal	201,6	18,0	8,9
4. Pembayaran Kewajiban Utang	184,9	63,5	34,3
a. Utang Dalam Negeri	168,5	59,0	35,0
b. Utang Luar Negeri	16,4	4,5	27,3
5. Subsidi	182,6	40,3	22,1
a Subsidi Energi	102,1	30,4	29,8
i. BBM (Pertamina)	63,7	17,6	27,7
ii. Listrik (PLN)	38,4	12,8	33,2
b Subsidi Non Energi	80,5	9,9	12,4
6. Belanja Hibah	4,0	0,1	1,6
7. Bantuan Sosial	54,9	12,1	22,1
8. Belanja Lainnya	24,7	2,4	9,9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	770,2	268,6	34,9
1. Transfer ke Daerah	723,2	251,0	34,7
a. Dana Perimbangan	700,4	244,8	34,9
i. Dana Transfer Umum	491,5	186,2	37,9
- Dana Bagi Hasil	106,1	26,2	24,6
- Dana Alokasi Umum	385,4	160,0	41,5
ii. Dana Transfer Khusus	208,9	58,6	28,0
- Dana Alokasi Khusus Fisik	85,5	15,3	17,9
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik	123,5	43,3	35,1
b. Dana Insentif Daerah	5,0	2,9	57,7
c. Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY	17,8	3,3	18,5
i. Dana Otonomi Khusus	15,4	2,3	15,0
ii. Dana Tambahan Otonomi Khusus	1,8	0,5	30,0
iii. Dana Keistimewaan DIY	0,5	0,4	80,0
2. Dana Desa	47,0	17,6	37,5
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(88,2)	(94,7)	107,3
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(273,2)	(158,2)	57,9
E. PEMBIAYAAN	273,2	203,3	74,4
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	272,8	209,9	77,0
1. Perbankan dalam negeri	5,5	1,9	35,0
2. Non-perbankan dalam negeri	267,3	208,0	77,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	0,4	(6,7)	(1.674,3)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	75,1	8,9	11,8
a. Pinjaman Program	36,8	6,7	18,3
b. Pinjaman Proyek	38,3	2,2	5,6
2. Penerusan SLA	(5,9)	0,0	0,0
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(68,8)	(15,6)	22,6

Catatan :

* Pagu berdasarkan pagu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016 yang disajikan berdasarkan klasifikasi akuntansi

(1) Laporan disusun berdasarkan data realisasi sementara s.d. 29 April 2016

PDB : Rp11.421 triliun (tahun 2015), Rp12.705 triliun (tahun 2016)

(2) Laporan bersifat sangat sementara